

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari indeks demokrasi terhadap kemiskinan di Indonesia sejak tahun 2009 sampai 2019. Adapun tujuan secara spesifik dalam penelitian, Yaitu: 1) Menguji dan menganalisis pengaruh Aspek Kebebasan Sipil dari Indeks Demokrasi terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2019. 2) Menguji dan menganalisis pengaruh Aspek Hak - Hak Politik dari Indeks Demokrasi terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2019. 3) Menguji dan menganalisis pengaruh Aspek Lembaga Demokrasi dari Indeks Demokrasi terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2019.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Kemiskinan

Menurut Kuncoro (2020), kemiskinan diartikan sebagai gambaran individu yang memiliki standar hidup rendah disebabkan penghasilan minim, kawasan tinggal layak yang kurang, rendahnya harapan hidup, dan kurang pengetahuan. Kemiskinan merupakan masalah yang multi dimensi sebab ada kaitannya dengan ketidakmampuan dalam mengakses beberapa fasilitas pendukung baik secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi oleh masyarakat itu sendiri yang dilihat melalui perspektif ekonomi politik (Aprianto 2016).

Terdapat beberapa alasan kemiskinan harus diukur (*World Bank Institute, 2020*) yaitu:

1. Agar masyarakat miskin berada dalam pengawasan dan rencana
2. Agar terdapat identifikasi orang miskin dan intervensi untuk program pengentasan kemiskinan
3. Agar menjadi pengawasan maupun kebijakan intervensi terhadap orang miskin
4. Agar menjadi penilaian efisiensi lembaga pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan

Mengenai kemiskinan, Fernandez menyatakan bahwa terdapat beberapa ciri dengan meninjau dari berbagai aspek (Arsyad, 2016), yakni:

1. Aspek politik yang dimana untuk memperbaiki kehidupan mereka tidak ada akses untuk menyampaikan masalah yang dihadapi.
2. Aspek sosial ialah masyarakat miskin tidak diperhatikan bahkan terasingkan
3. Aspek ekonomi ialah terdapat kualitas sumber daya manusianya yang rendah, kesehatan yang tidak memadai, kualitas Pendidikan maupun keterampilan kurang sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan.
4. Aspek budaya atau nilai yang dimana sumber daya manusia terlalu kental akan budaya sehingga kualitasnya menjadi rendah seperti mudah menyerah, tidak bisa berpikir panjang untuk menyelesaikan masalah, serta etor kerja nya yang rendah.

Tambunan (2015) juga mengemukakan mengenai faktor-faktor penyebab kemiskinan bahwa ada yang berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan. Kemiskinan disebabkan oleh kondisi individu maupun situasi kolektif masyarakat yang ada. Sedangkan, secara konseptual kemiskinan diakibatkan oleh empat faktor, yakni:

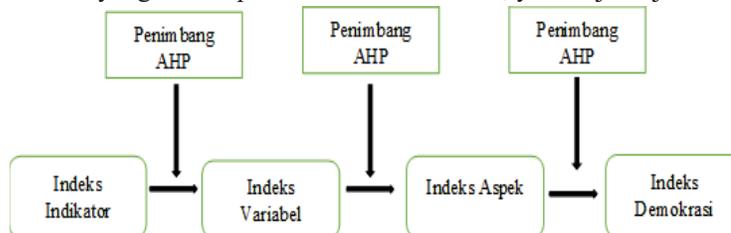
1. Faktor individual ini berkaitan dengan beberapa aspek seperti aspek patologis. Kondisi kemiskinan disebabkan karena adanya perilaku, pilihan dan kemampuan yang dimiliki individu itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya.

2. Faktor sosial berkaitan dengan adanya diskriminasi berdasarkan dari gender, usia, etnis yang bisa menyebabkan seseorang menjadi miskin. Dari adanya kondisi-kondisi lingkungan sosial tersebut bisa menjebak seseorang untuk menjadi miskin.
3. Faktor kultural yang ditimbulkan dari kondisi atau kualitas budaya. Kondisi ini berkaitan dengan sikap-sikap yang negatif seperti adanya rasa malas, fatalism atau mudah menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha dan kurang motivasi akan bekerja atau menghormati etos kerja. Kondisi tersebut sering ditemukan pada orang-orang miskin.
4. Faktor struktural ini menunjuk pada tingkat struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan rendahnya aksesibilitas pada Lembaga-lembaga pelayanan sosial sehingga menimbulkan adanya kemiskinan

2.2. Indeks Demokrasi

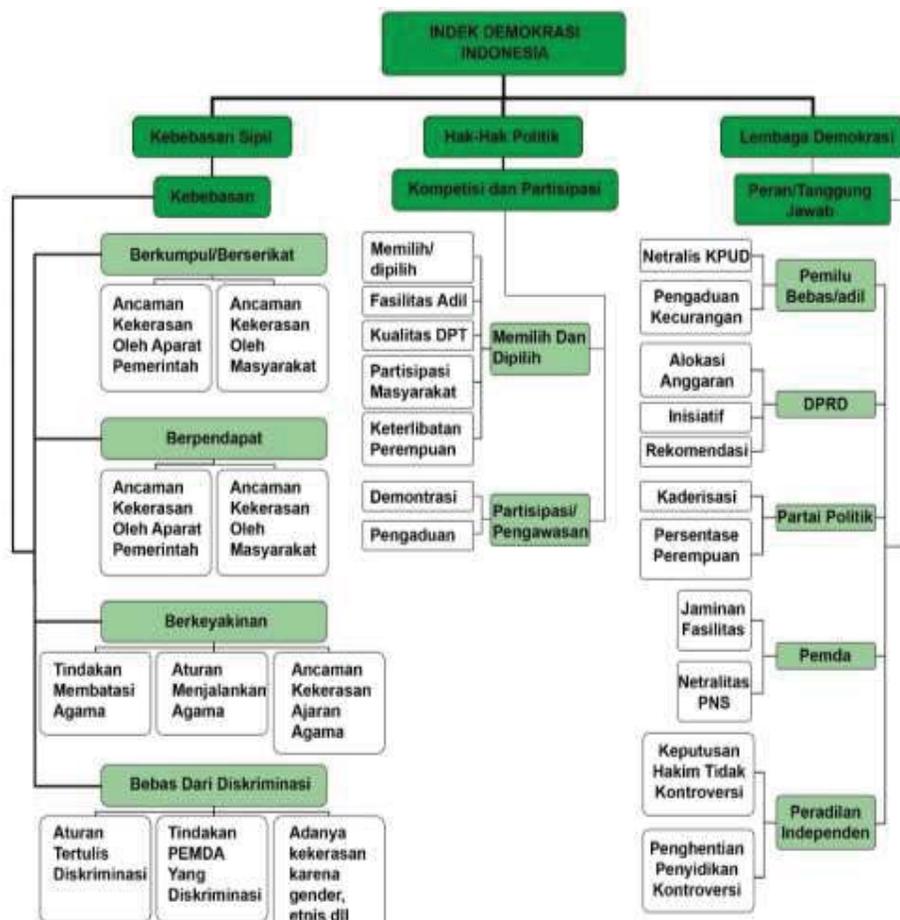
Indeks Demokrasi merupakan indeks yang telah disusun oleh Economist Intelligence Unit (EIU) memiliki tujuan sebagai pengukur dalam melihat keadaan demokrasi yang ada pada 167 negara. Dengan demokrasi juga bisa membatasi peluang pemerintah dalam melakukan sistem pemerintahan yang berlawanan dengan kehendak masyarakat (Syaukani, dkk. 2012). Demokrasi adalah sistem politik yang mendasarkan prinsipnya pada kedaulatan rakyat. Hal tersebut bukan berarti masyarakat bisa langsung menetapkan kehidupan politik dalam suatu negara tetapi politisi berada dibawah pengaruh masyarakat (Daven, 2016). Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) diukur melalui tiga aspek, yaitu Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak-Hak Politik, dan Aspek Lembaga Demokrasi (BPS, 2020).

Berdasarkan laporan dalam Indeks Demokrasi Indonesia (2011), bobot yang digunakan dalam mengukur indeks demokrasi ditentukan melalui proses secara terpisah yang menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) yang berarti dalam menentukan prioritas di antara sejumlah kriteria memerlukan penilaian ahli dengan menggunakan pendekatan metodologis. AHP adalah model untuk mengambil keputusan dengan input utama yang didapat dari persepsi manusia yang dimana merupakan metode untuk memecahkan suatu masalah kelompok secara hirarki. Saaty (2008) dalam Kuncoro (2014) mengungkapkan bahwa AHP juga memberikan prioritas alternatif dalam melacak ketidakkonsistenan dalam pertimbangan maupun preferensi seorang responden. Terdapat tahapan dalam pembobotan AHP yaitu dilakukan wawancara dengan menyebarkan kuesioner dan setelah kuesioner terkumpul maka akan dilakukan tabulasi data atau jawaban responden untuk setiap pertanyaan dan jawaban yang paling banyak akan terpilih. Lalu, akan dilakukan penentuan prioritas yang dimana setiap kriteria dan alternatif melakukan perbandingan berpasangan. Setelah dilakukan penentuan prioritas maka akan dilakukan bobot prioritas yaitu hasil perbandingan berpasangan AHP dalam bobot mencerminkan relatif pentingnya elemen hirarki. Saaty (2008) dalam Kuncoro (2014) menyatakan hasil dari perbandingan berpasangan akan membentuk matrik yang berciri positif dan berkebalikan, yaitu $a_{ij}=1/a_{ji}$.



Gambar 2.1. Proses Perhitungan Indeks Demokrasi

Dalam perhitungan Indeks Demokrasi di Indonesia (IDI) tingkat daerah dilakukan secara tahapan sesuai pada gambar diatas. Sebelum menghitung indeks tersebut akan dilakukan menghitung indeks data kuantitatif setiap indikator yang didapatkan dari hasil review surat kabar dan dokumen sehingga akan dilanjutkan perhitungan indeks indikator sampai indeks demokrasi. Capaian indeks demokrasi ditunjukkan skala 1-100 dengan skala normatif dimana 1 dinyatakan kinerja rendah dan 100 dinyatakan kinerja tertinggi. Skala 1-100 dibagi lagi menjadi tiga kategori kinerja demokrasi yaitu kategori baik dengan indeks >80, kategori sedang dengan indeks 60-80 dan kategori kurang dengan indeks <60.



Gambar 2.2. Aspek, Variabel, dan Indikator Indeks Demokrasi

Aspek kebebasan sipil sendiri dipengaruhi oleh beberapa indikator yang terdapat kebebasan berpendapat, berkeyakinan, berkumpul dan kebebasan dari diskriminasi yang mencakup adanya kebebasan individu atau masyarakat dan secara spesifik termasuk dalam bentuk pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Lalu aspek hak-hak politik dipengaruhi oleh indikator hak memilih dan dipilih dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan yang mencakup berpartisipasi dan aspek Lembaga demokrasi yang dipengaruhi oleh indikator pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, partai politik dan birokrasi pemerintah daerah serta peran peradilan yang independen mencakup peran atau tanggung jawab institusi atau lembaga. Walaupun demokrasi diartikan adanya kebebasan bukan berarti bebas tanpa batas melainkan berdiri di atas supremasi hukum (Kusmanto, 2014). Terdapat beberapa unsur penting untuk menopang demokrasi secara

tegak (Fahmi, 2019), yakni: termasuk negara hukum, memiliki masyarakat yang madani, memiliki aliansi kelompok yang strategis.

2.3. Pengaruh Indeks Demokrasi terhadap Kemiskinan

Amartya Sen yang merupakan seorang peraih nobel ekonomi pada tahun 1998 menyatakan bahwa terdapat hubungan antara demokrasi dan pengentasan kemiskinan di sebuah negara dengan menggunakan pendekatan kebebasan dalam mengembangkan pembangunan (Sunaryo, 2017). Sen memberikan pendapat mengenai teori kebebasan yang berarti tidak ada paksaan yang dimana dengan kebebasan dapat memberikan kesempatan dalam menyampaikan pendapat maupun kritikan mengenai kebijakan dalam mengatasi masalah serta menentukan pilihan untuk memenuhi kehidupan individu. Demokrasi memiliki dampak terhadap pengurangan tingkat kemiskinan seperti kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat akan berakibat pada proses dalam pengambilan kebijakan (Arifin, 2019). Sehingga hal ini menunjukkan bahwa dalam mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kualitas demokrasi belum bisa menjamin untuk mencapai kesejahteraan termasuk dalam mengurangi kemiskinan.

Demokrasi bukan salah satu sistem sosial dan politik pemerintahan yang paling sempurna dalam mengatur kehidupan di suatu negara (Bariyah, 2022). Dengan adanya keterbukaan ruang yang diberikan oleh pemerintah dalam aspek hak-hak sipil, aspek kebebasan politik serta aspek lembaga demokrasi kepada masyarakat maka suatu negara akan bisa mencapai tingkat kesejahteraan (Sunaryo, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi memiliki relasi dengan kemiskinan yang ditunjukkan apabila kualitas demokrasi tidak baik maka akan memunculkan kualitas pemimpin yang tidak baik sehingga kebijakan tidak berpihak pada masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan adanya korupsi sehingga kemiskinan akan meningkat. Demokrasi memiliki hubungan yang kuat terhadap pengentasan kemiskinan karena apabila kualitas demokrasi baik maka akan menciptakan para pemimpin yang baik sehingga kebijakan yang dibuat akan berpihak pada masyarakat dan masalah kemiskinan bisa diatasi (Sutarto, 2019).

Mengurangi kemiskinan harus dilakukan sejalan dengan meningkatkan indeks demokrasi melalui peningkatan hak-hak sipil dan politik di bidang ekonomi (Adnan & Amri, 2021). Sehingga kualitas demokrasi bisa mencerminkan baik atau tidaknya perekonomian maupun kesejahteraan (Aditiyawarman, 2020). Aspek hak sipil dan hak politik penting untuk diperhatikan guna mencapai perubahan dalam sistem demokrasi menjadi baik agar mencapai kesejahteraan terutama negara berkembang (Arianto, 2017). Pengentasan kemiskinan tidak akan tercapai karena ketidakstabilan politik, tidak ada campur tangan pemerintah, kurangnya kebijakan dan dislokasi makroekonomi serta penuh dengan korupsi sehingga hal tersebut menjadi tantangan dalam kebijakan pemerintah (Hussaini, 2014).

2.4. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai indeks demokrasi terhadap kemiskinan. Seperti penelitian Abbas & Dompok (2020) mengenai pengaruh demokrasi terhadap kesejahteraan yang ada di Indonesia menggunakan metode penelitian kualitatif yang mendapatkan hasil bahwa demokrasi cukup berpengaruh dan berdampak untuk mencapai tingkat kesejahteraan di negara demokrasi termasuk di Indonesia tetapi juga harus dibarengi dengan sistem politik dan sistem lainnya. Sehingga dengan adanya sistem demokrasi diharapkan bisa

mewujudkan berbagai kebijakan-kebijakan maupun program yang dibuat agar mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat maupun masyarakat.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2019) menunjukkan hasil bahwa demokrasi dengan kesejahteraan sosial memiliki keterkaitan secara eksplisit. Tetapi sistem demokrasi di Indonesia bisa mencapai kesejahteraan sosial karena di dalamnya mengandung nilai keadilan dan kebebasan. Mencapai kesejahteraan juga tidak langsung tercapai dengan demokrasi melainkan perlu memperhatikan penguatan dalam kelembagaan, hak politik serta adanya nilai yang mengandung kebebasan. Penelitian yang dilakukan oleh Assadzadeh & Pourqoly (2013) menemukan bahwa di negara Mena terkait investasi asing dan peningkatan kualitas kelembagaan berpengaruh dan signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Adanya kebebasan sipil juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Begitu juga dengan stabilitas politik yang baik yang dimana bisa menarik investasi asing untuk meningkatkan sektor produksi sehingga lapangan kerja meningkat yang diikuti pendapatan sehingga bisa mengurangi kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bariyah (2022) dari hasilnya menemukan bahwa indeks demokrasi melalui aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi terjadi hubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan yang berarti jika indeks demokrasi meningkat maka ketimpangan juga akan meningkat. Adapun penelitian Chujor (2017) mengenai demokrasi sebagai instrumen dalam mengentaskan kemiskinan di Afrika yang mengacu pada pengalaman Nigeria menunjukkan bahwa dalam mengurangi kemiskinan bisa dilakukan dengan sistem demokrasi yang masih diperlukan juga adanya partisipasi dari masyarakat atau individu, LSM, organisasi berbasis baik maupun dari pemerintah agar bisa mengatasi masalah mengenai kemiskinan. Kim et al. (2016) menemukan demokrasi dapat mempengaruhi atau mengurangi kemiskinan di Korea Selatan yang dilihat adanya partisipasi dari sistem demokrasi yang dapat menciptakan sebuah interaksi antara masyarakat yang memberikan saran mengenai kebijakan atau program yang dilakukan oleh pemerintah sehingga akan saling memberikan kontribusi. Penelitian yang dilakukan oleh Martha et al. (2014) menemukan bahwa demokrasi belum bisa mencapai tingkat yang sejahtera di Indonesia. Demokrasi tidak memiliki hubungan dan tidak berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan di suatu negara. Karena di Indonesia terdapat beberapa sistem pengukuran kesejahteraan sehingga masih jauh dari standar kesejahteraan. Jadi sistem politik maupun demokrasi masih belum bisa untuk mencapai tingkat kesejahteraan di Indonesia karena masih banyak hal lainnya yang masih bisa diperjuangkan maupun diperhatikan untuk mencapai kesejahteraan.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Nawawi (2015) mengenai hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam pembuatan kebijakan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat terdapat tidak adanya keterbukaan dalam penggunaan dana APBD dengan masyarakat sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan DPRD kurang sadar mengenai kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian, penggunaan APBD tidak dipergunakan untuk masyarakat miskin karena terlihat bahwa tidak signifikan dan relatif kecil dalam mengurangi kemiskinan. Kenyataannya, anggaran dari APBD adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Dalam penelitian Nihaya (2016) menemukan demokrasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap kemiskinan namun untuk di Indonesia masih belum terjadi hubungan secara signifikan. Hal tersebut ditunjukkan karena demokrasi hanya akan ada bagi masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan secara ekonomi yang cukup. Jadi, bagi masyarakat yang tergolong ekonomi bawah tidak mendapatkan maupun merasakan dampak

demokrasi yang baik. Sehingga dari kondisi tersebut mendapatkan kesan bahwa demokrasi termasuk kaum elit. Lalu, Rasbin (2018) menemukan bahwa adanya peran pemerintah daerah dapat menurunkan kemiskinan dan pengangguran di Kota Yogyakarta dan Malang dengan melalui adanya program-program seperti program rapor keluarga, Gerakan Segoro Amarto, KUBE, dan CSR serta peran diluar APBD yang berasal dari pelaku usaha dan perbankan.

Penelitian yang dilakukan Sujarwono (2015) menemukan bahwa stabilitas politik berpengaruh terhadap kemiskinan yang dimana akan terjadi peningkatan pada kemiskinan jika stabilitas politik meningkat karena adanya kekuasaan. Jika kurang merespon mengenai demokrasi maupun kurang memperhatikan pembangunan maka para stabilitas politik akan menggunakan kekuasaannya untuk mengambil kebijakan yang tidak diperhatikan maupun dikontrol oleh masyarakat sehingga kemiskinan tidak bisa diatasi. Hal tersebut terbukti dari banyaknya kasus korupsi oleh masyarakat yang berpendapatan tinggi serta kurangnya perhatian pemerintah daerah untuk mendengarkan pendapat masyarakat. Penelitian Sutarto (2019) mengenai adanya implementasi nilai demokrasi yang dijadikan solusi dalam pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi pancasila menjadi penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan sehingga meningkatkan kesejahteraan sosial terutama dalam mengurangi kemiskinan. Lalu penelitian Widuri (2021) menemukan bahwa demokrasi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Eropa yang menunjukkan masyarakat yang tinggal di Eropa Barat paling sejahtera dibandingkan masyarakat di Eropa Timur. Tidak hanya itu, ditemukan juga bahwa jumlah wanita yang di parlemen menunjukkan berpengaruh terhadap kesejahteraan di Eropa.

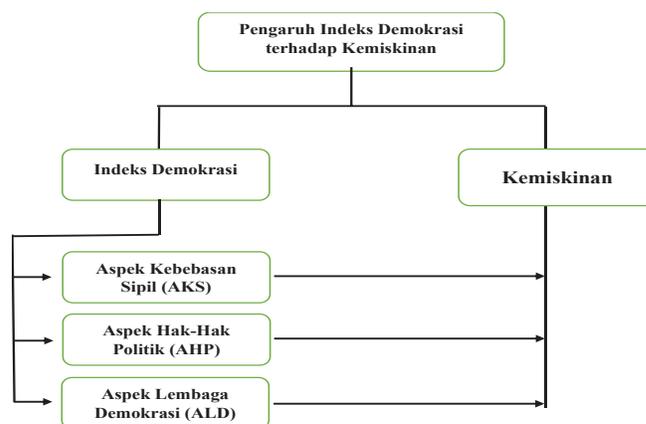
Sedangkan Yolanda & Satrianto (2019) menemukan bahwa indeks persepsi korupsi berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap kemiskinan yang berarti korupsi meningkat maka kemiskinan menurun, demokrasi berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap kemiskinan yang dimana demokrasi meningkat maka kemiskinan menurun, politik berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan yang dimana politik meningkat maka kemiskinan menurun dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi korupsi, demokrasi dan politik terhadap kemiskinan di negara-negara ASEAN. Begitu juga penelitian yang dilakukan Zaini (2019) terkait pemberlakuan politik demokrasi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan Sosial menunjukkan pemberlakuan demokrasi terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan sosial. Menunjukkan bahwa demokrasi memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan. Namun, belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dari sistem demokrasi. Akan tetapi masih bisa diharapkan bahwa dapat mencapai kebijakan tersebut jika diperhatikan dengan baik.

2.5. Kerangka Konseptual dan Hipotesis

1. AKS (X1) : Dalam meningkatkan Aspek Kebebasan Sipil yang dimana terdapat kebebasan dapat memberikan peluang bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan tanpa adanya ancaman maupun hambatan sehingga mengurangi tingkat kemiskinan.
2. AHP (X2) : Dalam meningkatkan demokrasi pada Aspek Hak-Hak Politik dengan adanya hak berpartisipasi dapat menjalankan kebijakan yang dibuat atau dukungan dari masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

3. ALD (X3) : Dalam meningkatkan indeks demokrasi pada Aspek Lembaga Demokrasi dengan adanya peran dari institusi atau lembaga untuk menjalankan kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat tanpa mementingkan diri sendiri atau kekuasaan pribadi maka bisa mengurangi tingkat kemiskinan.

Pengaruh dari berbagai dimensi tersebut dapat dilihat pada variabel Indeks Demokrasi dan Tingkat Kemiskinan yang dinyatakan sesuai pada arah anak panah, sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

- a) H1: Tingkat Aspek Kebebasan Sipil berpengaruh dan Signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.
- b) H2: Tingkat Aspek Hak-Hak Politik berpengaruh dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.
- c) H3: Tingkat Aspek Lembaga Demokrasi berpengaruh dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan numerik dengan analisis statistika (Sugiyono, 2015). Metode penelitian deskriptif adalah metode yang biasa digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang dapat memberikan gambaran mengenai suatu hal atau keadaan dengan pertanyaan apa, dimana, kapan dan bagaimana (Zikmund et al, 2013). Pendekatan kuantitatif adalah mengidentifikasi secara sistematis mengenai fenomena dengan menggunakan data yang diukur melalui teknik statistik, matematika atau komputasi. Data kuantitatif yang disajikan yakni dalam bentuk angka-angka runtun waktu (time series) dan silang tempat (cross Section). Data time series didefinisikan sebagai data runtun waktu yang berisikan sekumpulan observasi dalam menggunakan rentang waktu tertentu. Sedangkan data cross section didefinisikan sebagai data antar tempat atau ruang yang dikumpulkan dengan menggunakan kurun waktu tertentu yang menunjukan pada tempat maupun ruang (Widarjono, 2013).

Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda yang dimana teknik analisis dilakukan bertujuan menguji pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini juga menggunakan data panel yang merupakan gabungan dari data runtun waktu (*time series*)